

KONTRIBUSI BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM DEMOKRATISASI (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)

Yuwanto, Arif Sofianto

Abstract

The Reformasi (Reform) of 1998 led to changes in Indonesia's various governmental institutions, reforms upon the structures of the judiciary, legislature, and executive office. All those changes aspects of national politics affected public orientations and political activity. In the light of political culture, this study is aiming to know how the national politics changes on procedural level of democratization after Reformasi influence the substantial changing of local political culture. This study employs a descriptive-qualitative method, and designated Banyumanik Subdistrict in Semarang Municipal as a research site. This study concluded that the changing of national politics on procedural level of democratization are dosen't influence the substantial changing of local political culture

Keywords: political culture, democratization, local democracy

A. PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi arus utama dalam sistem pemerintahan di dunia saat ini. Hasil penelitian UNESCO menunjukkan bahwa demokrasi adalah nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (Miriam Budiardjo, 2008:105). Di Indonesia, perubahan politik pascajatuhnya Orde Baru diwarnai dengan semangat membangun tatanan kehidupan yang bertumpu pada nilai-nilai demokrasi. Demokrasi menjadi isu utama dalam penataan struktur pemerintahan maupun tata kelola kehidupan masyarakat. Akan tetapi realitas di lapangan masih perlu dipertanyakan apakah kehidupan politik pascareformasi benar-benar menuju ke arah demokrasi substansial. Reformasi politik sebagai bentuk transisi demokrasi di Indonesia dapat dilihat menggunakan analisis Haynes (2000:134-137) yang menguraikan bahwa di kebanyakan negara dunia ketiga, transisi demokrasi lebih banyak memperlihatkan wajah demokrasi formal. Demokrasi hanya terlihat di permukaan yang terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan dan tidak membawa ke arah substantif yang berpusat pada nilai. Di tingkat masyarakat lokal, demokrasi dimaknai sebagai liberalisasi politik yang berwajah protes sosial berupa aksi menjatuhkan pemimpin-pemimpin yang bermasalah, sebagaimana dikemukakan Sutoro Eko (2004:61).

Pertanyaan besar yang kini dihadapi Indonesia pascareformasi adalah demokrasi seperti apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapai demokrasi yang diharapkan tersebut. Hal ini berkaitan dengan ketidakpastian arah demokratisasi di Indonesia di tengah banyaknya konsep demokrasi serta karakteristik demokrasi yang berbeda-beda. Hasil penelitian UNESCO juga menyebutkan bahwa konsep demokrasi dianggap ambigu atau mempunyai banyak pengertian mengenai ide dan praktiknya; dan secara umum tersusun dari nilai-nilai universal yang juga diwarnai dengan nilai lokal (Miriam Budiardjo, 2008:105).

Secara universal, Schumpeter sebagaimana dikutip oleh Agustino (2007:139-140) mengemukakan bahwa demokrasi ialah kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Henry B. Mayo seperti yang dikutip Budiardjo (2008:117) menyatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala berdasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berdasarkan prinsip kelembagaan, Dahl sebagaimana dikutip Sahid (2009:251) menyatakan bahwa setidaknya ada 6

lembaga dalam implementasi demokrasi. *Pertama*, pemimpin yang dipilih melalui pemilu; *kedua*, pemilu yang jujur, adil, bebas dan periodik; *ketiga*, kebebasan berpendapat; *keempat*, terbukanya akses informasi; *kelima* otonomi asosiasional bagi warga; dan *keenam* hak kewarganegaraan yang inklusif.

Berkaitan dengan nilai lokal demokrasi, sebuah penelitian yang pernah dilakukan mengenai nilai budaya politik dan demokrasi lokal menyimpulkan bahwa secara umum terdapat kesamaan nilai demokrasi di semua wilayah yang diteliti, yaitu yaitu persamaan (*equality*), pemilihan umum (*election*), kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), dan musyawarah untuk mufakat (*concensus and deliberation*). Ditemukan ada korelasi positif antara demokrasi lokal dengan level budaya politik, ada atau tidaknya demokrasi lokal, tergantung pada budaya politik mampu mendorong realisasinya. Sebagai masyarakat yang majemuk, demokrasi nasional salahsatunya ditopang oleh demokrasi lokal dan interaksi antarlokal. Dengan demikian upaya demokratisasi di Indonesia, dimulai dari bawah, karena demokrasi lokal merupakan penopang demokrasi nasional (Siti Zuhro et al., 2009:268-270).

Dengan demikian, bahasan demokratisasi juga terkait dengan budaya politik hingga ke tingkat lokal. Menurut Almond dan Verba sebagaimana dikutip Chilcote (2007:302), budaya politik merupakan orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-individu dalam berhubungan dengan sistem politik mereka, yang kemudian menjadi agregat pada tingkat kolektif. Pye sebagaimana dikutip Chilcote (2007:299) menyatakan bahwa budaya politik merupakan metode kerja dari hal-hal terpendam psikologi individual yang kompleks hingga ke tingkat agregat sosial. Pye membedakan budaya politik pada tingkat individu sebagai kontrol perilaku politik yang efektif, dan tingkat kolektif sebagai struktur sistematis nilai-nilai dan pertimbangan rasional yang memastikan koherensi kinerja intstitusi-institusi dan organisasi-organisasi.

Terkait penjelasan di atas, penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan terkait demokratisasi pascareformasi dan nilai-nilai budaya politik yang mendukungnya. *Pertama*, apakah perubahan politik reformasi membawa pengaruh substansial dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, sampai pada tingkat lokal. *Kedua*, bagaimanakah dalam sebuah masyarakat yang majemuk dapat terbangun sebuah karakter budaya politik yang mampu menopang demokrasi. *Ketiga*, bagaimana budaya politik yang terbangun tersebut dapat berkontribusi bagi perwujudan demokrasi.

Kecamatan Banyumanik adalah salah satu wilayah majemuk, yang cukup beragam secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Wilayah di pinggiran selatan Kota Semarang ini merupakan salah satu pusat perkembangan permukiman dan industri, namun nilai-nilai tradisional juga masih menampilkan bentuk yang kuat. Ada masyarakat yang masih bercorak tradisional, terdidik dalam tradisi lokal, ada kalangan menengah perkotaan terdidik dalam tradisi modern. Dengan demikian, Kecamatan Banyumanik merupakan wilayah yang menarik untuk dikaji bagaimana nilai budaya politik yang terbentuk mampu mendukung demokratisasi pascareformasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah menganalisis bagaimanakah perubahan-perubahan pascareformasi memberi bentuk bagi nilai budaya politik dan perwujudan demokrasi di tingkat lokal serta kontribusi nilai-nilai budaya politik masyarakat bagi perwujudan demokrasi lokal.

A.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Banyumanik beserta lembaga sosial. Informan berasal dari aparat pemerintahan lokal, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga kemasyarakatan dan warga biasa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah panduan wawancara mendalam dan daftar pertanyaan (kuesioner) terbuka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Spradley. Analisis model Spradley merupakan kesatuan proses linear yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya.

B. PEMBAHASAN

B.1. Gambaran Umum

Kecamatan Banyumanik adalah wilayah yang majemuk, dari sekian banyak keberagaman, yang paling menonjol di banyak tempat adalah pertemuan nilai dan perilaku tradisional dengan modern. Warga asli yang masih menjalankan tradisi dan dengan nilai tradisional, berbaur dengan semakin maraknya pembangunan pabrik dan pusat perbelanjaan, permukiman baru dengan pendatang dari berbagai tempat.

Hal lain yang penting adalah tingkat partisipasi penduduk Kecamatan Banyumanik tergolong baik. Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Banyumanik pada Pemilu Walikota Semarang tahun 2010 sebesar 61,44% dan rata-rata untuk Kota Semarang adalah 60,06%.

B.2. Nilai Budaya Lokal, Nilai Politik dan Demokrasi

Kontribusi budaya politik terhadap demokratisasi dapat dikelompokkan menjadi 2 hal penting yang saling terkait, *pertama* adalah kontribusi terhadap pemahaman atau nilai-nilai demokrasi di tingkat masyarakat, *kedua* adalah kontribusi terhadap perilaku demokratis dalam keseharian masyarakat. Kedua kontribusi tersebut masing-masing memiliki sisi konstruktif dan destruktif bagi demokrasi yang berasal dari nilai lama maupun nilai baru yang berkembang pascareformasi.

B.2.a. Pemahaman / Nilai Demokrasi

Kontribusi pada pemahaman/nilai demokrasi bisa dibedakan menjadi kontribusi yang konstruktif dan destruktif. Kontribusi-kontribusi tersebut muncul dari 2 sumber, yaitu nilai tradisi yang sudah berjalan dan nilai baru yang muncul seiring perubahan dalam masyarakat.

Kontribusi yang konstruktif berasal dari nilai-nilai tradisi dan kebiasaan masyarakat adalah penerimaan terhadap aturan main yang cukup baik, toleransi terhadap perbedaan yang tinggi dan nilai kebersamaan tinggi. Walaupun terdapat perbedaan di beberapa wilayah, tergantung apakah wilayah tersebut perdesaan, perkotaan, kampung atau perumahan, akan tetapi ada pola umum yang menjadi ciri utama.

Mematuhi aturan main dan prosedur menjadi nilai yang tinggi dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut terwujud dalam kesediaan warga masyarakat melestarikan tradisi dan adat yang sudah berjalan cukup lama sebagai sebuah keutamaan. Sesuatu yang sudah terpola dan terus dilakukan, sebagai sesuatu yang dianggap baik masih dijaga oleh warga. Tradisi seperti *nyadran*, *apitan* (sedekah bumi), *pudunan*, *punggahan* masih dijalankan oleh warga masyarakat. Dalam keseharian, kesadaran akan aturan main tersebut masih mewarnai perilaku warga, walaupun saat ini mendapat desakan dari nilai-nilai baru yang lebih praktis.

Melaksanakan apa yang telah disepakati bersama merupakan tanggungjawab sosial yang dijunjung tinggi. Dalam pertemuan warga atau organisasi kemasyarakatan, kesepakatan atau keputusan yang dibuat selalu menjadi acuan warga. Dengan demikian, kesetiaan masyarakat Kecamatan Banyumanik terhadap tradisi dan adat memberikan kontribusi pada komitmen warga melakukan apa yang sudah disepakati atau diputuskan bersama sebagai aturan main.

Pemahaman atau nilai-nilai lain yang cukup penting ialah mau menerima perbedaan sehingga pluralitas menjadi hal yang biasa dan sudah menjadi keseharian masyarakat. Di kebanyakan perkampungan ada sebagian warga dengan pendidikan tinggi dan penghasilan tinggi, tinggal di suatu daerah yang mayoritas menengah dan rendah, tetapi hubungan sosial terjalin dengan baik. Tidak terdapat kesulitan dalam interaksi antar warga dalam suatu lingkungan. Penghargaan yang lebih pada orang-orang tertentu memang ada, akan tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap relasi sosial.

Perbedaan keyakinan juga tidak menjadikan jarak antar warga menjadi jauh, sebaliknya diterima sebagai hal yang biasa dan menjadi bagian keseharian. Sangat jarang bahkan tidak pernah muncul konflik secara terbuka antar warga dengan keyakinan yang berbeda. Walaupun ada tempat ibadah umat Kristen yang dibangun di tengah permukiman yang hampir seluruhnya penduduknya Islam tidak ada permasalahan dari warga. Dalam aktivitas sehari-hari, warga saling bantu dan memahami kepentingan masing-masing. Dalam acara tasyakuran yang diselenggarakan umat Islam, warga nonmuslim juga diundang dalam acara tersebut; begitu juga sebaliknya, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan cukup lama. Dengan demikian, toleransi yang kuat memberikan landasan bagi masyarakat untuk menghargai keberadaan orang lain dengan latar belakang dan keyakinan berbeda.

Selain perbedaan di atas, perbedaan latarbelakang tradisi juga tidak menghalangi masyarakat untuk saling bekerjasama. Nilai kebersamaan tercipta sebagai akibat percampuran berbagai latarbelakang yang saling mendukung. Dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan, partisipasi yang tinggi menjadi keunggulan. Banyak momentum adat, tradisi dan keagamaan terbukti mampu membangun partisipasi warga. Bentuk nyata misalnya dalam peringatan *apitan* di perkampungan yang membutuhkan biaya dan tenaga besar ternyata mendapat dukungan dari warga lain, termasuk golongan pendatang di perumahan. Di sebagian besar kelurahan, warga yang tidak menyelenggarakan *apitan* menyokong warga yang menyelenggarakannya. Di Kelurahan Gedawang ada semacam karnaval budaya, juga diikuti warga perumahan dengan menampilkan berbagai kreasi warga. Nilai kebersamaan menjadikan semua elemen masyarakat memiliki peran masing-masing.

Pemahaman dan nilai demokrasi di atas sudah terbangun sejak lama, sebelum reformasi bergulir dengan berbagai ide baru. Reformasi memerkaya pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi yang pada beberapa segi bertolak belakang dengan nilai-nilai lama. Akan tetapi berkurangnya nilai lama tersebut membawa pengaruh yang positif bagi demokrasi di masyarakat.

Nilai demokrasi baru di masyarakat yang cukup penting adalah mengenai nilai kesetaraan (berkurangnya *patrimonialisme*) dan kebebasan berpendapat yang diwujudkan dalam muasyawarah mufakat. Meskipun nilai-nilai tersebut baru pada tahap perkembangan, penyebaran, dan belum merasuk secara mendalam dalam keseharian masyarakat; tetapi dalam beberapa kasus, pemahaman tersebut telah tampak mewarnai aktivitas masyarakat.

Pemahaman mengenai kesamaan posisi, hak dan kewajiban warga negara membuat masyarakat memiliki kesadaran akan kesamaan atau kesetaraan. Latar belakang apapun tidak menjadi pembeda hak dan kewajiban seseorang. Wacana-wacana baru mengenai protes sosial dan intervensi masyarakat bawah dalam kebijakan pemerintah yang menyebar cepat lewat media menjadi sarana utama masuknya pemahaman tersebut. Dengan demikian saat ini situasi sosial diwarnai dengan berkurangnya praktik patrimonialisme dan tumbuhnya kesadaran terhadap kesetaraan, kebebasan, keterbukaan. Tidak seperti sebelumnya, posisi tokoh masyarakat sentral dalam menangani semua masalah, sekarang sudah mulai berkurang. Setiap warga bisa memiliki peran yang setara. Pengurus lembaga kemasyarakatan misalnya sebelum reformasi kebanyakan berasal dari kalangan tertentu, seperti aparat/pegawai negeri atau tokoh agama, namun saat ini latar belakang pengurus lembaga kemasyarakatan sudah cukup beragam. Sebagian besar bahkan berasal dari kalangan wiraswasta atau buruh dengan pendidikan rata-rata SLTA. Siapapun yang dianggap mampu, maka dia bisa diberi kepercayaan, tidak melihat pada latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi atau status lainnya.

Dampak lanjutan pemahaman mengenai nilai kesetaraan di atas adalah berkembangnya kebebasan, terutama kebebasan berbicara. Forum pertemuan warga atau acara pertemuan warga dianggap lebih baik ketika semua orang boleh berbicara dan menyalurkan aspirasinya. Harapan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial cukup tinggi. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi ketakutan warga membahas perihal apapun dan menyampaikannya kepada pemerintah. Hal ini berbeda dari masa sebelumnya ketika warga takut untuk membicarakan berbagai hal menyangkut kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, belum banyak warga yang memanfaatkan dengan baik peluang kebebasan berbicara tersebut. Sikap menunggu masih begitu terasa sehingga dalam berbagai forum masih terlihat dominasi segelintir orang. Setiap persoalan yang dibahas dan ditanggapi warga, kebanyakan bermula dari informasi atau stimulus orang tertentu, bukan dari inisiatif warga.

Dalam konteks lain, nilai-nilai lama yang destruktif juga masih mewarnai kehidupan masyarakat; salah satunya adalah orientasi sikap patrimonialistik, meskipun tidak sekuat di masa prareformasi. Selain itu, ada nilai pragmatisme yang cukup kuat tertanam sejak lama di kalangan masyarakat Kecamatan Banyumanik. Patrimonialisme masih terlihat dalam berbagai aktivitas kehidupan. Ada seseorang yang karena usia, pendidikan, jabatan, kekayaan atau lainnya dianggap sebagai sesepuh atau tokoh masyarakat yang lebih diistimewakan dibanding lainnya. Patrimonialisme juga terlihat ketika masyarakat menghadapi berbagai problem, akan meminta penyelesaian kepada tokoh masyarakat, baik ketua RT, RW, maupun tokoh sosial lainnya. Juga terdapat ketua RW yang sangat lama tidak diganti, karena yang bersangkutan belum mau melepaskan jabatan tersebut, sementara warga tidak berani melakukan upaya pergantian. Ada juga warga yang jarang atau tidak pernah terlibat dalam pertemuan, namun tidak pernah mendapat teguran atau peringatan, karena yang bersangkutan memiliki posisi sosial tinggi, dan warga memakluminya. Sementara warga lain memperoleh perlakuan berbeda karena kedudukan sosial yang rendah.

Pragmatisme masyarakat ialah pengutamakan berbagai kepentingan jangka pendek dibanding kepentingan yang lebih panjang. Pragmatisme dalam masyarakat adalah apapun cara asal menghasilkan keuntungan atau tujuan bisa ditempuh, sehingga ciri utama adalah kurangnya ideologi yang kuat. Dalam pemilihan wakil rakyat, orientasi ekonomis (finansial) lebih tinggi dibanding mencari pemimpin yang

baik. Dalam memilih ketua RT ataupun RW, cara apapun dan siapapun yang terpilih tidak masalah, asalkan terjadi pergantian. Pada beberapa dasawarsa sebelumnya, derajat kehidupan yang rendah, bertemu dengan perubahan modernisasi, menghasilkan tipologi masyarakat yang pragmatis. Kesulitan hidup bertemu dengan berbagai tawaran dari modernisasi membuat pragmatisme menjadi kuat.

Selain nilai-nilai lama yang kurang mendukung demokrasi di atas, juga ada nilai baru yang muncul pascareformasi cenderung destruktif. Nilai baru yang cenderung destruktif adalah memaknai kebebasan sebagai apapun bisa dilakukan dan menggejalanya demokrasi prosedural dalam masyarakat.

Kebebasan yang dimaknai apapun bisa membuat potensi konflik horisontal maupun vertikal meningkat. Perebutan sumberdaya dan mengabaikan ketentuan menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Hal ini memang menjadi kontradiksi dengan nilai lama tentang ketaatan pada aturan main atau tradisi. Kenyataan dalam masyarakat adalah adanya konflik laten karena berbagai kepentingan yang sifatnya personal maupun kelompok. Misalnya di beberapa wilayah ada konflik antara warga dengan pengurus RT tentang bagaimana mengakses bantuan dari program pemerintah. Ada sebagian kelompok warga, mengajukan bantuan kepada pemerintah tanpa sepengetahuan RT, tetapi mengatasnamakan seluruh warga. Ketidakpercayaan antarwarga menjadi penyebabnya. Juga ada keluhan bagaimana masyarakat tidak memerhatikan kepentingan umum, misalnya dalam penataan jalan lingkungan, sehingga ada pergeseran ke arah orientasi individual yang mengutamakan keuntungan diri sendiri.

Masyarakat juga terjebak memaknai demokrasi lebih kepada rangkaian prosedur, tidak pada pencapaian nilai. Misalnya dalam pemilihan ketua RT maupun RW, nilai demokrasi berupa partisipasi dan kesamaan hak tidak menjadi alasan utama suatu cara, tetapi lebih kepada pertimbangan tercapainya hasil. Mekanisme yang digunakan menggunakan mekanisme pemilu karena musyawarah tidak mencapai hasil. Namun substansi pemilu juga tidak mengandung nilai kesepakatan antar warga. Pemilihan kadang menjadi "momok" atau memojokkan orang agar terpilih dan tidak bisa mengelak. Sesuatu sudah berjalan demokratis hanya dimaknai ketika prosesnya menggunakan prosedur demokrasi, tetapi nilai dan substansinya belum berlandaskan demokrasi.

Berbagai pemahaman dan nilai di atas saling tarik-menarik; yakni pada satu kesempatan didominasi oleh pengaruh konstruktif, di satu sisi lainnya oleh pengaruh destruktif. Kontribusi positif nilai-nilai budaya politik lokal terhadap demokrasi di Kecamatan Banyumanik ialah memberikan landasan bagi komitmen bersama, toleransi, kerjasama dan partisipasi yang tinggi. Sedangkan sebaliknya, kontribusi negatif adalah nilai-nilai patrimonial yang masih ada, pragmatisme, kebebasan tanpa batas dan gejala proseduralisme.

B.2.b. Perilaku Demokrasi

Seperti halnya kontribusi pada pemahaman atau nilai demokrasi, kontribusi terhadap perilaku demokratis juga terdiri dari kontribusi yang sifatnya konstruktif dan destruktif; masing-masing juga terdiri dari nilai lama dan nilai baru. Perilaku merupakan aktualisasi nilai, tetapi tidak selalu menunjukkan kesesuaian, karena sebagian akan terdistorsi oleh kebutuhan dan situasi.

Perilaku demokratis yang bersumber dari nilai lama adalah mudah untuk bekerjasama. Pemahaman terhadap pluralitas dan toleransi terwujud melalui perilaku mudah menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan. Warga berasal dari latar belakang berlainan, akan tetapi kerjasama antarwarga juga mudah terjalin.

Dalam kehidupan warga, tidak ada friksi yang mengganggu, karena tingginya toleransi dan saling memahami antarwarga. Warga di perumahan, bersedia membantu warga di perkampungan melaksanakan tradisi *apitan* yang membutuhkan banyak dana. Dalam peringatan kemerdekaan RI yang waktunya berdekatan dengan acara halal-bihalal misalnya, dengan kesepakatan warga acara dijadikan satu, dan di situ banyak warga nonmuslim yang terlibat. Berbagai bentuk kerjasama lain terjadi di antara warga dengan latar belakang berbeda, misalnya hajatan warga.

Perilaku lain ialah menghormati keberadaan kelompok lain dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok. Di salah satu wilayah di Kelurahan Srandol Wetan, warga muslim yang mayoritas sering menggelar pengajian rutin berkeliling rumah warga, namun pengurus lingkungan juga mendorong umat Kristen yang lebih sedikit untuk melakukan hal yang sama di lingkungan mereka. Keharmonisan ini juga terjadi di banyak daerah lain. Antarpemeluk agama saling memahami dan menghormati kegiatan masing-masing, tanpa ada gangguan.

Menghormati keberadaan orang lain, juga terlihat dari wujud perilaku yang selalu bermusyawarah dalam membahas segala persoalan. Musyawarah menjadi mekanisme utama warga membahas segala persoalan, dengan harapan adanya keterlibatan yang luas dan kebebasan berbicara antarwarga. Musyawarah memang bersumber dari perilaku lama, namun semakin menguat dan mendapatkan landasan substansial pascareformasi.

Perilaku demokratis yang merupakan pengaruh langsung dari reformasi ialah tingginya partisipasi warga. Setidaknya ada 3 jenis partisipasi yang bisa menjadi bahan analisis, yaitu: (1) partisipasi warga di lingkungan masing-masing (2) partisipasi warga dalam organisasi sosial dan organisasi politik, dan (3) partisipasi dalam proses pemilihan.

Partisipasi warga dalam lingkungan misalnya di lembaga kemasyarakatan seperti RT, PKK, RW, LPMK dan organisasi lain. Kedekatan warga dengan lingkungan, membuat partisipasi menjadi tinggi, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi partisipasi ada kalanya juga merupakan adaptasi warga terhadap lingkungan. Agar diterima di lingkungan, maka warga perlu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, partisipasi seperti ini lahir karena keterpaksaan. Di masa Orde Baru, partisipasi bisa karena keterpaksaan atau ketakutan terhadap rezim. Partisipasi juga muncul karena rasa *ewuh-pekewuh* dengan warga lainnya. Di era reformasi, ada sedikit pergeseran dalam partisipasi, mulai muncul partisipasi sebagai kesadaran karena warga memang membutuhkan hal tersebut. Berdasarkan data di lapangan, tingkat partisipasi warga dalam kegiatan kemasyarakatan rata-rata 75%; meskipun cenderung menurun di beberapa tempat karena pengaruh nilai-nilai individualisme, tetapi secara umum masih tergolong baik.

Partisipasi warga dalam organisasi sosial maupun politik, baik ormas maupun parpol cenderung mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan situasi politik secara nasional yang membutuhkan banyak keterlibatan warga. Mobilisasi masih lebih kuat dibanding partisipasi otonom. Walaupun kebanyakan warga hanya menjadi partisan atau pengikut, tetapi secara umum di banyak wilayah terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Di sisi lain, semakin banyak juga warga yang mulai hilang kepercayaan terhadap elit dan semakin apatis; terutama ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah dan perilaku para elit. Keyakinan warga tentang apa yang dilakukan di lingkungan akan membawa perbaikan (*political efficacy*) menjadi semakin berkurang, dan warga tidak percaya apa yang dilakukannya di lingkungan bisa berpengaruh secara luas.

Namun demikian dibanding wilayah lain, Kecamtam Banyumanik masih tergolong sedikit lebih bagus. Ukuran yang jelas adalah pada partisipasi pemilu Walikota Semarang tahun 2010, partisipasi warga Kecamatan Banyumanik di atas rata-rata Kota Semarang. Ini menunjukkan kepedulian dan harapan warga terhadap sistem politik cukup tinggi dibanding daerah lain.

Sedangkan kontribusi perilaku destruktif terhadap demokrasi juga berasal dari perilaku lama dan baru yang muncul pascareformasi. Perilaku lama yang destruktif adalah pragmatisme yang cukup tinggi, sedangkan perilaku baru adalah orientasi ekonomis (finansial) dalam partisipasi dan individualisme meningkat.

Pragmatisme menjadi perilaku yang sudah mengakar cukup lama di masyarakat Kecamatan Banyumanik. Prinsipnya adalah apapun asal mendapatkan hasil, dalam berbagai bidang kehidupan, orientasinya adalah hasil atau capaian yang dibutuhkan, dengan mengabaikan substansi dan proses. Ideologisasi sangat lemah, orang akan memilih apapun yang bisa menguntungkan. Menjual tanah untuk mendapatkan uang langsung, lebih dipilih dibanding memanfaatkannya untuk keperluan produktif, apalagi menjaga kelestarian lingkungan. Bekerja di pabrik lebih dipilih daripada mengolah lahan pertaniannya. Cara apapun untuk memilih ketua RT atau RW dilakukan berdasarkan pertimbangan asal disetujui warga untuk memperoleh hasil terpilihnya orang baru, bukan semangat mewujudkan demokrasi.

Dengan pragmatisme yang tinggi, *money politics* dalam pemilu mendapatkan tempat di masyarakat. Di beberapa wilayah, tim sukses bahkan langsung bertemu dengan ketua RT atau RW menawarkan kompensasi untuk kemenangan calonnya. Beberapa menolak tetapi tetap ada yang menerima kompensasi tersebut. Pengaspalan jalan, *paving* atau perbaikan jembatan dan saluran air menjadi andalan utama mencari dukungan massa di wilayah Kecamatan Banyumanik melalui RT atau RW. Selain itu juga ditemukan orientasi ekonomis yang sifatnya individual, misalnya dalam hal memilih, masyarakat juga dimobiliasi untuk menjadi tim sukses kelompok tertentu.

Perilaku lain yang lebih umum adalah orientasi warga dalam relasi sosial, yaitu terjadinya pergeseran dari orientasi komunal yang harmonis menjadi orientasi individual yang menyimpan potensi konflik. Masyarakat mulai bergeser menjadi lebih individualistik, solidaritas sosial berkurang, dan urusan individu menjadi sangat diutamakan. Ada kesepakatan di RT bahwa seseorang bisa memilih untuk membayar iuran bulanan atau bertugas jaga malam. Warga yang lebih mampu lebih baik membayar denda untuk tidak datang pada saat jaga malam di lingkungan atau lebih baik memberikan sumbangan dana pembangunan dibanding datang kerja bakti. Sedangkan warga kalangan bawah tidak akan bekerja jika tidak ada kepastian kompensasinya. Situasi seperti ini semakin menguat pascareformasi.

Dengan demikian, kontribusi budaya politik lokal terhadap demokrasi dalam hal perilaku ialah memberikan pengaruh yang konstruktif dan destruktif. Pengaruh konstruktif ialah kerjasama, menghargai keberadaan orang lain dan partisipasi yang baik dalam sistem politik lokal maupun nasional. Sedangkan pengaruh destruktif adalah pragmatisme yang kuat, orientasi finansial dalam partisipasi dan menguatnya individualisme masyarakat yang kurang mendukung kesetaraan dan kebersamaan.

B.2.c. Kontribusi Nilai Budaya Politik Pada Demokrasi

Berdasarkan uraian di atas, budaya politik di wilayah penelitian terbentuk dari nilai-nilai lama dan baru yang berkembang pascareformasi. Orientasi-orientasi individu dan agregasi pada tingkat kolektif menunjukkan adanya percampuran antara nilai lama dan baru serta pertentangan antara nilai demokratis dan

nondemokratis. Dengan demikian, kontribusi nilai-nilai budaya politik dalam demokrasi lokal berupa kemajemukan konsep, nilai dan perilaku. Tercakup di dalamnya baik nilai-nilai yang mendukung maupun menghambat demokrasi, baik yang terbentuk jauh sebelum reformasi maupun hadir menyertai reformasi. Oleh karena itu, demokrasi yang terbentuk merupakan tahap mencari konsep dan nilai yang terus berkembang, selain tidak terlepas dari nilai budaya lokal, juga mendapat pengaruh sangat kuat dari nilai demokrasi yang bersifat universal.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi budaya politik lokal terhadap demokratisasi dapat dibedakan menjadi kontribusi terhadap pemahaman atau nilai demokrasi dan kontribusi terhadap perilaku warga masyarakat. Kontribusi tersebut berasal dari nilai lama maupun baru pascareformasi yang dapat memberikan kontribusi konstruktif maupun destruktif.

Kontribusi konstruktif nilai-nilai budaya politik lokal ialah memberikan landasan bagi komitmen bersama, toleransi, kerjasama dan partisipasi yang tinggi. Sedangkan kontribusi destruktif adalah nilai-nilai patrimonialisme yang masih ada, pragmatisme, kebebasan tanpa batas dan proseduralisme.

Kontribusi konstruktif perilaku ialah kerjasama, menghargai keberadaan orang lain dan partisipasi yang baik dalam sistem politik lokal. Sedangkan kontribusi destruktif adalah pragmatisme yang kuat, orientasi ekonomis (finansial) dalam partisipasi dan menguatnya individualisme masyarakat yang kurang mendukung kesetaraan dan kebersamaan.

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, agar budaya politik lokal mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya demokratisasi, maka disarankan pemerintah perlu memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat untuk membangun dirinya menjadi masyarakat sipil yang kuat, dan elit politik memberikan contoh perilaku yang mengarah pada penguatan praktik kehidupan yang demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chilcote, Ronald H. 2007. *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Eko, Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD Press.
- Gatara, AA. Sahid. 2009. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haynes, Jeff. 2000. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mas'ood, Mohtar & Colin MacAndrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Priyono, A.E et al. 2004. "Transisi Demokrasi Telah Dibajak." *Majalah Tempo*. 10 Oktober 2004. <http://www.demosindonesia.org>.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhro, R. Siti et al. 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Ombak.